

Sosialisasi Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Ruang Alexandri Lt. 3 di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin

Rabiatul Adawiah¹, Nurbaiti²

^{1,2} Politeknik Kesdam VI Banjarmasin, Indonesia

Received : 19 Juli 2025, Revised : 22 Juli 2025, Published : 31 Juli 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Nurbaiti

E-mail: nurbaitimkm3@gmail.com

Abstrak

Keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan masih menjadi masalah di masyarakat, disebabkan oleh rendahnya kesadaran, pemahaman, serta kondisi ekonomi. Banyak peserta tidak menyadari bahwa keterlambatan dapat menyebabkan penonaktifan kepesertaan dan menghambat akses layanan kesehatan. Selain itu, iuran sering dianggap sebagai beban, terutama bagi peserta mandiri. Rumusan masalah meliputi penyebab keterlambatan, dampaknya terhadap layanan kesehatan, dan upaya meningkatkan kesadaran peserta. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, mengurangi keterlambatan pembayaran, serta mendukung keberlanjutan Program JKN. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi langsung, edukasi berbasis media (poster, leaflet, video), serta pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dan aplikasi digital. Kegiatan ini dilakukan secara partisipatif untuk menjangkau lebih banyak peserta. Hasil menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran tepat waktu, serta respons positif terhadap penggunaan media dan teknologi sebagai sarana edukasi. Edukasi ini turut mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan.

Kata Kunci - BPJS kesehatan, keterlambatan pembayaran iuran, edukasi masyarakat, program jaminan kesehatan nasional (JKN)

Abstract

Late payment of BPJS Health contributions is still a problem in the community, due to low awareness, understanding, and economic conditions. Many participants do not realise that delays can lead to deactivation of membership and hamper access to health services. In addition, contributions are often considered a burden, especially for independent participants. The formulation of the problem includes the causes of delays, the impact on health services, and efforts to increase participant awareness. The purpose of this service is to increase public understanding, reduce late payments, and support the sustainability of the JKN Programme. The methods used include direct socialisation, media-based education (posters, leaflets, videos), and the use of information technology such as social media and digital applications. This activity was conducted in a participatory manner to reach more participants. The results showed an increase in public awareness of the importance of timely payment, as well as a positive response to the use of media and technology as a means of education. This education also encourages active community participation in maintaining the sustainability of the health insurance programme.

Keywords - health BPJ, late premium payment, community education, national health insurance program (JKN)

How To Cite : Adawiah, R., & Nurbaiti, N. (2025). Sosialisasi Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Ruang Alexandri Lt. 3 di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 3(4), 1158–1163. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.354>

Copyright ©2025 Rabiatul Adawiah, Nurbaiti Nurbaiti

PENDAHULUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan program jaminan sosial nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (BPJS, 2011). BPJS terbagi menjadi dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang semakin penting perannya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas (BPJS Kesehatan, 2022).

Pencatatan dan pengelolaan rekam medis yang baik sangat penting dalam pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi (Nurbaiti et al, 2025), penyakit tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah gaya hidup (Nurbaiti et al, 2024), terutama untuk memastikan kontinuitas pelayanan kesehatan dan monitoring perkembangan kondisi pasien penyakit menular maupun tidak menular. Keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada status kepesertaan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama dalam hal distribusi layanan yang merata (Wulandari & Praditha, 2022).

Peserta mandiri BPJS Kesehatan memiliki pilihan kelas layanan yang berbeda, yaitu Kelas I (Rp150.000), Kelas II (Rp100.000), dan Kelas III (Rp42.000) per bulan per orang hingga tahun 2025 (BPJS Kesehatan, 2023). Iuran tersebut menjadi sumber utama pembiayaan program JKN, yang kemudian dikelola oleh BPJS untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat. Apabila peserta menunggak pembayaran, maka kepesertaannya akan dinonaktifkan hingga tunggakan dilunasi (BPJS Kesehatan, 2022). Jika peserta memanfaatkan layanan rawat inap dalam 45 hari sejak kepesertaan kembali aktif, maka dikenakan denda administrasi sebesar 2,5% dari biaya pelayanan (BPJS Kesehatan, 2021).

Penerapan UU No. 24 Tahun 2011 telah dilaksanakan secara nasional, termasuk di Kota Banjarmasin. Salah satu fasilitas kesehatan yang berperan dalam pelayanan JKN adalah RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang melayani peserta BPJS baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Berdasarkan fenomena yang terjadi, masih banyak peserta yang mengalami keterlambatan pembayaran iuran karena rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepesertaan aktif. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan sosialisasi di Ruang Alexandri, Lantai 3, RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, dengan tujuan memberikan edukasi kepada peserta JKN tentang pentingnya pembayaran iuran tepat waktu serta meningkatkan kesadaran peserta akan kewajiban tersebut.

METODE

Kegiatan sosialisasi terkait keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilaksanakan di Ruang Alexandri Lantai 3, RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Sasaran utama kegiatan ini adalah pasien rawat inap yang menjadi peserta BPJS Kesehatan di ruang tersebut. Jumlah sasaran meliputi empat kamar rawat inap kelas I, dua kamar kelas II, dua kamar kelas III, serta satu kamar isolasi. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pada tahap persiapan, tim terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan kepala ruangan untuk memperoleh izin dan informasi awal terkait kondisi di lapangan. Selain itu, tim juga melakukan survei awal untuk mengidentifikasi isu terkait keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di kalangan pasien. Tim pelaksana terdiri dari perawat ruangan dan peserta BPJS yang sedang menjalani rawat inap. Setelah tahap persiapan selesai, dilanjutkan dengan perencanaan kegiatan yang meliputi penetapan jadwal pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta jumlah peserta yang akan terlibat (Mubarak, 2018).

Pada tahap pelaksanaan, tim menggunakan metode penyuluhan dengan menyajikan materi secara interaktif. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi dengan dua narasumber. Narasumber pertama menyampaikan materi terkait pengertian BPJS, jenis-jenis BPJS, serta berbagai layanan yang tersedia bagi peserta. Narasumber kedua fokus pada aspek operasional, seperti cara pembayaran iuran, prosedur pendaftaran, manfaat kepesertaan, serta sanksi yang berlaku akibat keterlambatan pembayaran iuran (BPJS Kesehatan, 2023). Selama sesi berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Kendala utama yang ditemukan selama pelaksanaan adalah keterbatasan waktu dan fleksibilitas jadwal yang disesuaikan dengan kondisi medis peserta.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau

angket yang berisi pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Pendekatan evaluasi ini selaras dengan prinsip pendidikan kesehatan yang menekankan pentingnya umpan balik untuk menilai efektivitas kegiatan penyuluhan (Notoatmodjo, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi terkait keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk peserta mandiri, petugas layanan kesehatan, serta kader kesehatan setempat. Penyampaian materi dilakukan melalui metode tatap muka langsung dan pendekatan digital seperti penggunaan pamflet atau media online. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran iuran secara tepat waktu dan konsekuensi hukum yang mungkin diterima jika terjadi tunggakan (BPJS Kesehatan, 2023).

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 9 orang peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi. Hasil dari *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (6 dari 9 orang, atau sekitar 67%) belum memahami bahwa keterlambatan pembayaran iuran lebih dari tiga bulan dapat menyebabkan penonaktifan kepesertaan. Selain itu, hanya 3 peserta (33%) yang mengetahui adanya denda administratif sebesar 2,5% jika memanfaatkan layanan dalam kurun 45 hari setelah reaktivasi. Setelah kegiatan sosialisasi berlangsung, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan signifikan: seluruh peserta (100%) memahami sanksi keterlambatan pembayaran, dan 8 dari 9 peserta (89%) mampu menjelaskan prosedur pembayaran dan manfaat kepesertaan secara tepat. Hasil ini menunjukkan bahwa metode edukasi dan evaluasi yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, sebagaimana dirancang pada tahapan evaluasi dalam metode pelaksanaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penyuluhan langsung dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kesehatan (Putri & Yulianti, 2021). Lebih lanjut, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, hanya 2 peserta (22%) yang memahami manfaat aplikasi mobile JKN sebagai sarana pembayaran iuran secara daring dan pengecekan status kepesertaan. Setelah edukasi, sebanyak 7 peserta (78%) menyatakan siap menggunakan aplikasi tersebut sebagai upaya menghindari keterlambatan. Selain itu, 6 dari 9 peserta menyampaikan bahwa sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan informasi lengkap mengenai konsekuensi hukum akibat keterlambatan pembayaran. Setelah kegiatan berlangsung, seluruh peserta mengaku merasa lebih percaya diri dan bertanggung jawab untuk membayar iuran secara rutin, dan memahami bahwa keterlambatan bukan hanya berdampak pada layanan kesehatan pribadi, tetapi juga pada keberlanjutan sistem JKN secara kolektif.

Dari sesi diskusi yang berlangsung selama kegiatan, diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pembayaran iuran adalah keterbatasan ekonomi dan minimnya informasi yang diterima oleh peserta. Banyak dari mereka tidak mengetahui jadwal jatuh tempo atau alternatif metode pembayaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam komunikasi antara BPJS Kesehatan dan masyarakat, khususnya di daerah dengan akses informasi terbatas. Penelitian lain juga menegaskan bahwa keterbatasan finansial dan kurangnya pemahaman menjadi penghalang utama dalam kepatuhan peserta BPJS Kesehatan (Saputra & Suryadi, 2020).

Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kendala yang mereka alami secara langsung dan menerima solusi praktis. Misalnya, mereka mendapatkan informasi tentang metode pembayaran otomatis (autodebit), pemanfaatan aplikasi mobile JKN, serta layanan konsultasi terkait iuran. Beberapa peserta bahkan langsung melakukan pengecekan dan pelunasan tunggakan iuran setelah kegiatan selesai. Hal ini membuktikan bahwa edukasi yang diberikan secara langsung dan personal mampu memicu perubahan perilaku nyata. Ini selaras dengan prinsip promosi kesehatan yang menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan dan akses informasi dalam mendorong perubahan perilaku (Mubarak, 2018).

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa penyebaran informasi secara berkala dan pemanfaatan platform digital untuk menjangkau lebih banyak peserta. Disarankan pula agar BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, RT/RW, dan kader kesehatan sebagai agen penyampai informasi di tingkat lokal. Pendekatan komunitas semacam ini telah terbukti efektif dalam

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap program kesehatan (Notoatmodjo, 2012).

Pelaksanaan edukasi berperan penting dalam kesadaran masyarakat Seperti yang diungkapkan oleh Nurbaiti (2025), seperti kegiatan sosialisasi yang dilakukan, memang mampu memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta. Namun, untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan, diperlukan strategi yang lebih sistematis dan berkelanjutan, seperti penguatan peran puskesmas dan penyuluhan berbasis komunitas (Rahayu & Praditha, 2019). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi mobile, SMS reminder, atau media sosial juga terbukti efektif dalam mengingatkan peserta untuk membayar iuran tepat waktu (Pratama & Putra, 2020). Oleh karena itu, integrasi antara edukasi langsung dan sistem pengingat digital perlu dikembangkan untuk memastikan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan



Gambar 2. Sesi foto bersama dan akhir kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi terkait keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak peserta yang belum memahami secara mendalam pentingnya kedisiplinan dalam membayar iuran. Melalui penyuluhan yang diberikan, masyarakat menjadi lebih memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran, seperti dikenainya denda, penangguhan layanan kesehatan, hingga risiko pembatasan akses terhadap fasilitas medis. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai media efektif untuk menjelaskan hak serta kewajiban peserta BPJS Kesehatan secara lebih rinci. Setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pembayaran iuran sebagai wujud partisipasi dalam prinsip gotong royong sistem jaminan kesehatan nasional. Peserta mulai menyadari bahwa pembayaran iuran tepat waktu turut

menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas. Edukasi yang diberikan juga mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam memantau status kepesertaannya. Secara keseluruhan, sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan mencegah keterlambatan pembayaran di masa mendatang. Untuk itu, disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara rutin dan meluas ke berbagai wilayah, sehingga seluruh peserta BPJS Kesehatan memiliki pemahaman yang utuh dan bertindak lebih bertanggung jawab. Kerja sama antara BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam mendukung kelancaran dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian Dosen ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan di Politeknik Kesdam VI Banjarmasin. Selain itu juga sebagai pengembangan roadmap tim pelaksana agar lebih memperluas pengetahuan dan pengalaman. Pada kesempatan ini ijin kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R., & Nurbaiti, N. (2025). Gambaran Elektronik Rekam Medis Di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2024 . *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(9), 1730–1734. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i9.328>
- Adawiah, R., Nurbaiti, N., & Oktiana, N. A. (2025). Sosialisasi Perawat Dalam Penggunaan Elektronik Rekam Medis Ruang Alexandri LT 3 di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5542–5544. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i11.2024>
- BPJS Kesehatan. (2020). *Buku Saku Panduan JKN untuk Masyarakat* . Jakarta: BPJS Kesehatan.
- BPJS Kesehatan. (2021). *Panduan Teknis Pelaksanaan Program dan Pelayanan JKN* . Jakarta: BPJS Kesehatan.
- BPJS Kesehatan. (2022). *Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2022* . Diambil dari <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/>
- BPJS Kesehatan. (2023). *Peraturan Kepala BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran* . Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan* . Jakarta: Kemenkes RI.
- Mubarak, W. I. (2018). *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi* . Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurbaiti, N. (2025). Edukasi Bahaya Perilaku Merokok Sebagai Langkah Preventif Dalam Pencegahan Penyakit Hipertensi Pada Siswa SMA 1 GU Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 551–557. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.213>
- Nurbaiti, N., Adawiah, R., Chantika, RD, & Haerani, H. (2025). Studi Epidemiologi Deskriptif Pasien Hipertensi Berdasarkan Data Rekam Medis Rawat Jalan Dirumah Sakit TK III DR.R Soeharsono Banjarmasin . *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* , 1 (8), 925–935.
- Nurbaiti, Noor, N. N., Arsin, A. A. ., Andi Zulkifli, Arifin Seweng, & Suryani Tawali. (2024). Analysing The Role of Lifestyle Factors on Hypertension Among Rural Indonesian Adults: A Case-Control Study. *National Journal of Community Medicine*, 15(03), 167–174.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Peserta, Dan Pemberi Kerja Penyelenggara Negara Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Pratama, G. A., & Putra, D. S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Teknologi Informasi* , 8(2), 112–120. <https://doi.org/10.33365/jit.v8i2.789>
- Putri, A. S., & Yulianti, D. (2021). Pengaruh Edukasi Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas X Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* , 9(3), 1–10. <https://doi.org/10.24114/jkm.v9i3.27434>

- Putri, M. A., & Yulianto, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 123–134. <https://doi.org/10.21776/ub.jeb.2020.025.02.05>
- Rahayu, S. P., & Praditha, C. (2019). Peran Puskesmas dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 7(1), 45–53. <https://doi.org/10.24042/jkk.v7i1.4432>
- Saputra, H., & Suryadi, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 7(2), 123–134. <https://doi.org/10.31289/jiaog.v7i2.3825>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Diambil dari <https://jdih.kemkes.go.id/peraturan/uu/2011/UU%20No%2024%20Tahun%202011.pdf>
- Wulandari, R., & Praditha, A. (2022). Pengaruh Literasi Kesehatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Wilayah Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 45–54